

BAB IV

PREMANISME POLITIK DALAM

PEMILIHAN KEPALA DESA MONTOR SAMPANG MADURA

A. Premanisme dalam Pilkades

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan secara fokus tindakan-tindakan premanisme yang terjadi di dalam proses pemilihan kepala desa Montor. Pembahasannya meliputi latar belakang terjadinya premanisme politik dan sekaligus bentuk-bentuk tindakan premanisme. Penjelasan berikut diperoleh dari lapangan setelah penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Latar Belakang Premanisme dalam Pilkades

Dikatakan oleh Soerjono bahwa setiap fenomena yang terjadi dalam masyarakat pasti ada sebab yang melatarbelakanginya.¹ Termasuk di dalamnya tindakan premanisme yang terjadi dalam pemilihan kepala desa Montor Sampang Madura.

Menurut K. Moh. Iksan, salah satu tokoh agama di desa ini mengatakan bahwa tindakan premanisme dan kekerasan dalam pemilihan kepala desa lebih didorong oleh syahwat politik yang berlebihan:

Menurut saya: hal itu karena demi kekuasaan dan syahwat politik yang berlebihan. Bagaimana tidak, coba bayangkan ada yang sampai memusuhi saudaranya sendiri. Itu tidak masuk akal.²

¹ Soerjono, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005, hal: 129

² Hasil wawancara dengan K. Moh. Iksan pada tanggal 14 Desember 2012, jam: 09.00

Memang harus diakui bahwa politik dan kekuasaan dapat merubah sesuatu menjadi 180 derajat. Dalam politik, apapun bisa saja terjadi. Dalam tataran yang riil, kawan menjadi lawan, saudara menjadi musuh, hitam menjadi putih, bahkan halal menjadi haram, dapat dikatakan merupakan hal yang lumrah dan sudah mentradisi.

Pendapat itu kemudian diperkuat dengan fakta bahwa salah seorang calon kepala desa bersedia untuk membayar para tim kampanye berapapun juga dan memberikan uang kepada masyarakat asalkan dia berjanji untuk memilihnya dalam pemungutan suara. Arwana (bukan nama sebenarnya) mengaku telah menerima uang seratus ribu dari salah satu calon.

Di samping karena sebab politik dan kekuasaan, ada sebab lain sebagaimana dituturkan oleh Nawar:

Kalau menurut saya, kekerasan/premanisme yang terjadi dalam pemilihan kepala desa waktu lalu disebabkan karena telah biasa.³

Dari pernyataan informan tersebut, terjadinya kekerasan dan premanisme dalam pemilihan kepala desa cenderung karena telah menjadi tradisi. Dikatakan tradisi, karena tindakan dan cara-cara demikian sudah berlangsung sejak lama. Sedangkan masyarakat dan tokoh masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menjadi Penontonnya. Karena, *toh* ditegur mereka akan tetap melakukan hal yang sama di waktu dan tempat yang berbeda.

Waktu saya ikut pemilihan kepala desa di desa ini pertama kali memang sudah ada dan terjadi tindakan semacam itu.⁴

³ Hasil wawancara dengan Nawar pada tanggal 14 Desember 2012, jam: 10.03

⁴ Hasil wawancara dengan Turhamun pada tanggal 14 Desember 2012, jam: 20.23

Begitu juga dengan pak Isyam yang sudah sepuh. Beliau juga mengakui terjadinya tindakan-tindakan premanisme dalam pemilihan kepala desa sejak dahulu kala. Bahkan menurut beliau, tanpa ada tindakan semacam itu dalam pemilihan kepala desa, maka tidak akan seru dan kurang berkesan.⁵

Ada pula yang mengatakan bahwa terjadinya premanisme dalam pemilihan kepala desa lebih cenderung karena watak kemaduraan yang keras. H. Tamam selaku salah satu tokoh dalam masyarakat ketika diwawancarai mengatakan:

Kalau saya kurang tahu bagaimana bentuk tindakan yang dikatakan premanisme itu. Tapi kata orang-orang itu terjadi. Kalau sebabnya yang jelas itu karena watak keras sebagai orang Madura. Sedikit saja ada kesalahan, maka kekerasan yang berbicara. Dan itu dibawa dalam pilkades. Tapi sepertinya sudah mulai luntur, dan saya yakin beberapa tahun ke depan tradisi semacam itu akan hilang. Tapi mungkin juga ada sebab lain, seperti mencari uang. hehe.⁶

Dari pernyataan informan di muka, jelas bahwa terjadinya premanisme dalam pilkades disebabkan oleh watak masyarakat Montor yang dikenal keras sebagaimana masyarakat Madura pada umumnya. Di samping itu, ada indikasi sebab lainnya yaitu tuntutan ekonomi.

Dengan adanya indikasi tersebut, penulis mencoba menelusuri lebih jauh apakah benar ada keterlitaban ekonomis dalam proses terjadinya premanisme pilkades, Ternyata ada benarnya. Salah seorang *blater* wawan(bukan nama sebenarnya) ketika ditanya dia menuturkan:

Maaf ini rahasia sebenarnya, di samping saya ikut berpartisipasi dalam perpolitikan desa demi kemajuan desa ini, saya juga mengambil keuntungan dari itu. Uang kan kebutuhan kita

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Isyam pada tanggal 14 Desember 2012, jam: 21.30

⁶ Hasil wawancara dengan bapak H. Tamam pada tanggal 16 Desember 2012, jam: 07.30

sehari-hari. Dalam acara pilkades, para *blater* termasuk saya, kan tidak kerja lain, dari mana saya mendapatkan uang kalau bukan dari para calon itu.⁷

Bukan hanya orang *blater*, masyarakat awampun yang ikut berpartisipasi dalam pilkades juga tidak sedikit bertujuan untuk meraup keuntungan finansial.

Dari penjelasan di muka, jelas sekali bahwa terjadinya premanisme dalam pemilihan kepala desa Montor memiliki beberapa sebab yang berbeda-beda motifnya.

2. Bentuk Premanisme dalam Pilkades

Sebagaimana penjelasan dalam bab sebelumnya, bahwa premanisme yang terjadi di tengah masyarakat memiliki bentuknya masing-masing. Setidaknya secara umum premanisme dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu fisik dan psikis. Klasifikasi itulah yang kemudian penulis jadikan ukuran dalam meninjau premanisme yang terjadi dalam pilkades di desa Montor.

Dari berbagai penuturan para informan, penulis menyimpulkan bahwa tindakan premanisme yang terjadi dalam pilkades di desa Montor hanya berbentuk psikis dan tidak berbentuk tindakan fisik. Ada beberapa orang—selain informan yang telah ditentukan sebelumnya—yang penulis wawancarai terkait dengan bentuk premanisme dimaksud.

Veri (bukan nama sebenarnya) salah seorang warga dusun Kolbukol menyatakan:

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Nawar pada tanggal 16 Desember 2012, jam: 08.40

Saya itu hanya dipaksa untuk mencoblos dalam pemilihan kepala desa, tidak sampai memukul.⁸

Informan lain mengatakan:

Saya dan keluarga diberi uang dalam jumlah yang lumayan besar, dan kami terima. Ke esokan harinya, mereka datang lagi untuk memperingatkan agar mencoblos salah satu calon, jika tidak maka maling di desa ini akan banyak.⁹

Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa jika dia menuruti apa yang diinginkan untuk mencoblos calon tertentu, maka dia tidak akan dimintai iuran ketika membuka kios atau berjualan di pasar.

Saya kan pedagang dek, biasanya kalau di pasar ada orang yang minta iuran. Dan pada waktu itu (pilkades maksudnya) orang yang biasa minta iuran itu datang ke rumah dengan mengatakan “jika kamu memilih calon ini maka kamu tidak akan saya mintai iuran di pasar”.¹⁰

Bahkan jika masyarakat yang memiliki keluarga yang cukup besar, maka mereka akan diberi imbalan yang besar pula. Sebagaimana keluarga Sule (bukan nama sebenarnya) yang memiliki sekitar 26 suara. Menurut penuturannya dia bahkan akan diberi motor asalkan dapat mengordinasi semua anggota keluarganya untuk mencoblos calon tertentu.

Beneran saya, kata salah satu tim sukses saya akan dibelikan motor jika saya mampu mengajak seluruh keluarga saya yang berjumlah 26 untuk mencoblos salah satu calon. Tapi saya tidak meng'iya'kannya. Sebenarnya, saya takut, tapi gimana lagi, ini terkait dengan masing-masing anggota keluarga dan saya tidak bisa memaksa mereka satu persatu.¹¹

⁸ Hasil wawancara dengan Veri pada tanggal 16 Desember 2012, jam:10.40

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sinta pada tanggal 16 Desember 2012, jam: 08.58

¹⁰ Hasil wawancara dengan Evita warga dusun Plarbaan, pada tanggal 16 Desember 2012, jam: 09.30

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Sule pada tanggal 17 Desember 2012, jam: 08.00

Dari pernyataan beberapa informan tersebut memang tidak ada indikasi tindakan premanisme yang berbentuk fisik seperti memukul atau bahkan membunuh. Tidak seperti di desa lainnya di kecamatan Banyuates yang sering kali harus ada tindakan kekerasan fisik dalam setiap pemilihan, termasuk dalam pemilihan kepala desa.

3. Keterlibatan *Blater* dalam Pilkades

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa preman atau *blater* di desa Montor memiliki peran strategis di tengah kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk konkret peran mereka adalah keterlibatannya dalam pemilihan kepala desa. Dalam pemilu, biasanya mereka diangkat atau dijadikan sebagai tim sukses yang sekaligus untuk mencari masa. Dengan bekal keberanian yang dimilikinya, mereka dengan gagah mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mengajak mereka dalam mencoblos calon yang diusungnya.

Menurut Milan (bukan nama sebenarnya), salah satu dari calon telah menyewanya selama proses pilkades berlangsung.

Saya itu sistemnya disewa, otomatis saya juga mencoblos dia, begitu juga dengan keluarga saya. Saya ajak semuanya.

Lanjutnya:

Saya itu, sudah dibayar duluan dan setelah itu dijadikan sebagai ketua tim sukses di dusun tertentu, dan disuruh untuk mencari masa dengan cara silaturahmi. Ya saya mau. Lagi pula, jika calon itu terpilih maka saya akan diberi imbalan yang lebih besar katanya.¹²

Ada pula sebagian para *blater* hanya dimintai bantuan dalam pemilu kepala desa. Artinya, dia tidak ada deal politik sebagaimana *blater*

¹² Hasil wawancara dengan bapak Milan salah satu preman di desa Montor, pada tanggal 12 Desember 2012, jam: 08.40

sebelumnya yang sudah dikontrak dan dimasukkan menjadi tim suksesnya. Seperti Salamin (bukan nama sebenarnya juga) yang didatangi langsung oleh salah satu calon untuk meminta bantuan pengamanan selama pilkades berlangsung.

Saya itu cuma diminta membantu untuk mengamankan selama pilkades berlangsung. Saya tidak dipaksa untuk mencoblosnya. Ya saya cuma sebatas bantu pengamanan, dibayar gak apa-apa, gak dibayar juga tidak mengapa. Ini kan desa sendiri.¹³

Dari beberapa paparan tersebut, penulis mengklasifikasikan bahwa keterlibatan *blater* dalam pemilihan kepala desa Montor menjadi dua bentuk, yaitu: *pertama*, secara struktural. Artinya, seorang *blater* terlibat langsung dan berpartisipasi langsung dalam pemilu dengan masuk pada sistem atau struktur, seperti menjadi tim sukses atau struktur lainnya. *Kedua*, nonstruktural. Dalam tipe ini, *blater* hanya berpartisipasi hanya sebatas membantu dan tidak masuk dalam struktur pemenangan calon tertentu.

B. Latar Belakang Premanisme Politik dalam Tinjauan Sosial

Perlu diakui dan disadari bersama bahwa masyarakat dalam sebuah desa—termasuk di desa Montor—memiliki bentuk-bentuk strukturnya masing-masing, seperti kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, hingga kekuasaan dan politiknya. Dimana semua level tersebut memiliki suatu derajat dinamika tertentu yang menyebabkan pola perilaku yang berbeda, bergantung dari masing-masing situasi yang dihadapinya.¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan Salamin salah satu preman di desa Montor, pada tanggal 13 Desember 2012, jam: 09.20

¹⁴ Soekanto, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hal: 09

Perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat sebagaimana disebutkan, di satu sisi diyakini dapat berdampak positif dengan adanya interaksi antara satu individu atau kelompok dengan individu dan kelompok lainnya karena di dalam masyarakat pasti ada keteraturan sosial. Akan tetapi di sisi yang berbeda, ada yang mengatakan pula bahwa perbedaan semacam itu dapat menjadi media terjadinya konflik sosial, karena masing-masing masyarakat memiliki kepentingan dan tujuannya masing-masing yang bisa saja berbeda satu sama lain.

Dalam kaitan ini, ada dua teori sosial yang bertolak belakang dalam memandang konflik yaitu struktural fungsional dan teori konflik. Struktural fungsional memandang konflik sebagai fenomena yang memuat perilaku yang menyimpang. Sebaliknya, Parsons dalam tulisannya yang berjudul *Knowledge and Society*, mengasumsikan bahwa masyarakat bergerak dalam kondisi keseimbangan, dan setiap institusi dan tindakan dalam masyarakat memberi dukungan terhadap keadaan keseimbangan atau tertib sosial tersebut. Nalar sedemikian kemudian telah menggagas tentang suatu ide, bahwa konflik dipandang bukan bagian dari dinamika sistem sosial, karenanya dianggap sebagai penyimpangan. Dengan sendirinya konteks damai (*peace*) diartikan sebagai kondisi terbentuknya keadaan harmonis, keseimbangan (*equilibrium*) dan konsensus dari semua unsur sistem sosial.¹⁵

Secara berbeda, Teori-teori Konflik memandang konflik sebagai suatu bentuk interaksi manusia dalam membentuk sistem sosial. Konflik telah dipandang sebagai suatu gejala yang inheren di dalam masyarakat, karenanya

¹⁵ Ibid, soekanto, hal: 86

konflik tidak dipandang sebagai suatu kondisi disfungsional bagi sistem sosial. Bahkan Simmel telah menekankan bahwa fenomena konflik adalah bentuk lain dari sosiologi, sama halnya dengan fenomena persatuan. Kedua-duanya merupakan bentuk sosiologi yang timbal balik. Sehingga, mengasumsikan konflik sebagai kondisi yang “abnormal” adalah suatu pandangan yang bias.

Bertolak belakang dengan pandangan Parsons, perspektif Teori Konflik mengartikan fenomena damai(peace) sebagai kondisi dipertemukannya berbagai pertentangan atau kepentingan yang berbeda dalam suatu sistem relasi yang baru. Kondisi damai bukan diartikan sebagai kondisi meredam, menekan, atau meniadakan konflik, melainkan sebagai suatu kondisi sintesa, dimana konflik bisa dikelola dengan baik, dan ditransformasikan dalam bentuk yang kondusif bagi kehidupan manusia, melalui pendekatan-pendekatan tertentu dan musyawarah bersama.¹⁶

Terkait dengan pendapat kedua, dalam teori konflik sosial dijelaskan bahwa perbedaan derajat masyarakat dalam semua levelnya akan mengakibatkan terjadinya konflik dan perubahan sosial. Menurut Marx dan Park¹⁷, keduanya memandang kondisi ekologis dan ekonomi sebagai kondisi yang menjadi pemeran

¹⁶ Ibid, hal: 91

¹⁷ Keduanya adalah tokoh sosiologi khususnya dalam teori konflik. Karl Marx dilahirkan di Jerman pada tahun 1818 dari keluarga yang beragama Yahudi. Di samping sosial dia juga ahli dalam hukum, filsafat dan sejarah. Asumsi teori konfliknya di antaranya eksistensi menentukan kesadaran, materi menentukan non materi, heterogenitas masyarakat dapat menjadi pemicu konflik dan arah hidup mereka, dan masyarakat berakar pada kondisi hidup materinya. Sedangkan Robert Park adalah anak pengusaha yang lahir pada tahun 1864. Dia berkecimpung dalam dunia jurnalisme dan sosiologi begitu juga filsafat. Asumsi sosialnya di antaranya: perjuangan individu bersifat terus menerus untuk mempertahankan eksistensinya dan senang bersaing, dominasi dan seksesi, sistem sosial terdiri dari tatanan ekologi, ekonomi, politik, dan moral, perubahan sosial adalah suatu proses yang berurutan, dan yang lainnya. Lihat Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2005, hal: 112 dan 118

utama akan terjadinya konflik.¹⁸ Ekologi masyarakat dapat membentuk suasana pikiran dan pandangan individu yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Dalam hal ini, terjadinya premanisme dalam politik yang terjadi di desa Montor Sampang Madura dapat dibenarkan melalui teori ini. Artinya, masyarakat yang secara ekologis terletak di kepulauan yang terkenal panas dan terdiri dari mayoritas pesisir yang berwatak keras akan cenderung melakukan tindakan kasar dalam perilaku sehari-harinya. Hal ini didasarkan juga pada pernyataan Nawar dan Turhamun, dimana menurut mereka premanisme dalam pilkades lebih disebabkan oleh kebiasaan yang setiap tahunnya terjadi, di samping watak masyarakat yang kasar sebagaimana masyarakat Madura pada umumnya.¹⁹

Sedangkan secara ekonomi, masyarakat Madura termasuk masyarakat desa Montor selama ini dikenal dengan mata pencaharian yang kurang menguntungkan kehidupan mereka. Bercocok tanam dan pertanian bagi mereka tidak selamanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, ditambah lagi dengan melonjaknya harga makanan pokok yang semakin mencekik kondisi finansial mereka. Dengan begitu, sebagian masyarakat harus berfikir kreatif untuk mencari pekerjaan-pekerjaan alternatif demi pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Di antara mereka ada yang berkuli, ada yang berdagang, dan ada pula yang menjadi blater. Bahkan dalam taraf tertentu, sebagian mereka mengambil jalan pintas seperti meminta-minta di pasar, menjadi preman, mencuri, hingga bermain judi.

¹⁸ Kinloch, hal: 105.

¹⁹ Lihat hasil wawancara dengan Nawar dan Turhamun di halaman 57 dan 58.

Dalam ranah politik, himpitan ekonomi sering kali menjadi motivasi pertama bagi seseorang untuk meraup keuntungan sebanyak-banyak. Dengan watak keras dan keberanian yang dimilikinya, mereka mengekspresikan dirinya sebagai ‘pembantu’ salah satu calon dengan imbalan uang secukupnya. Lebih-lebih masyarakat yang terasing dan tereksplorasi, mereka akan lebih cenderung untuk memaksimalkan setiap momentum yang ada untuk pemenuhan kebutuhan finansial mereka.²⁰ Dengan begitu, tidak salah jika kemudian Marx dan Park mengatakan bahwa ekonomi (materi) masyarakat bertanggung jawab terhadap perkembangan dan evolusi perkembangan perilakunya, termasuk perilaku menyimpangnya semisal premanisme politik.²¹

Di samping ekonomi, watak dan budaya, politik sendiri sebagai salah satu institusi sosial juga memiliki peran jika dikaitkan dengan terjadinya konflik masyarakat seperti premanisme dalam pemilu. Ideologi politik masyarakat yang berbeda-beda tidak mustahil akan menjadi pemicu terjadinya klaim kebenaran antara satu dengan yang lainnya. Menurut yang berpartai jagung, dialah yang paling benar, sedangkan partai manggis dialah yang paling benar. Akibatnya, perbedaan dan klaim kebenaran tersebut pada waktu tertentu dapat meledak dan berubah menjadi bentuk yang menyeramkan, seperti misalnya kekerasan.

Dalam level kecilpun, seperti pemilihan kepala desa, perbedaan ideologi politik akan menemukan tempatnya. Setiap pendukung calon akan senantiasa menegasikan atau bahkan menjelekkan calon lainnya, begitu juga sebaliknya. Secara otomatis pula, salah satu calon akan menjaga dan membela dirinya

²⁰ Untuk membenarkan asumsi ini, lihat hasil wawancara di halaman: 59

²¹ Bernard, Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007, hal: 21

walaupun dengan menempuh jalan-jalan yang irrasional (tidak masuk akal), misalnya premanisme.²² Hal demikian, dalam pandangan sosiolog, utamanya yang menganut teori konflik, dipandang hal yang semestinya terjadi.

Karena dalam teori ini, adanya konflik itu sangat diperlukan dengan tujuan agar tercipta perubahan sosial. Ketika teori struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik keberaturan dan tidak ada konflik, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan.²³ Dan pada suatu titik tertentu, masyarakat akan mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama, karena di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus.²⁴ Pun juga, konflik dapat memperat hubungan sosial antara satu individu dengan yang lainnya yang berkonflik sekalipun. Misalnya, seseorang yang pada awalnya tidak pernah bertemu, ketika mereka memiliki konflik atau masalah maka mereka akan sering bertemu, akan bernegosiasi, akan bermusyawarah, dan akan sama-sama berupaya untuk mencapai mufakat bersama.

Dari penjelasan di muka dapat diambil benang merah bahwa konflik termasuk premanisme politik dalam pilkades di desa Montor sampang merupakan hal yang alamiah terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang heterogen dalam semua levelnya. Karena perbedaan masyarakat pada hakikatnya dengan sendirinya akan menuntut adanya konflik dengan berdasar pada kenyataan bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki peran, tujuan dan kepentingannya

²² Lihat hasil wawancara dengan K. Moh. Iksan di halaman: 57

²³ Narwoko, Dwi, dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada, 2006, hal: 37

²⁴ Lihat dalam Margaret, M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal: 19.

masing-masing yang bisa saja berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan masing-masing mereka akan terus bersaing dan bertahan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, walaupun harus mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidupnya.

Persaingan hidup yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial dan politik, disebabkan secara alamiah oleh sistem sosial yang terdiri dari ekologi, ekonomi, politik dan moral. Selama masyarakat terus berupaya untuk mempertahankan diri dan berevolusi dalam sosialnya, maka selama itu pula konflik dan premanisme politik akan terjadi. Akan tetapi, yang perlu diingat bahwa tidak selamanya konflik begitu juga premanisme berindikasi negatif, karena dalam konflik sejatinya terdapat negosiasi dan upaya penyatuan aspirasi yang akhirnya dapat berbentuk konsensus bersama: misalnya kesepakatan bersama untuk membangun desa secara bersama.

Di samping itu, konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.

Kaitannya dengan itu, Coser²⁵ mengutip hasil pengamatan Simmel²⁶ yang meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok. Dia menjelaskan bukti

²⁵ Lewis Coser lahir di Jerman 1913. Dia belajar di Columbia dan sangat akrab dengan Simmel. Dia juga seorang doktor yang aktif dalam lembaga-lembaga sosial. Asumsi sosiologis dalam teori konfliknya di antaranya; konflik meningkatkan penyesuaian sosial, tipe masalah menyangkut pengaruh konflik, konflik akan menjadi fungsional bagi sistem sosial.

²⁶ George Simmel lahir di Berlin dan ia adalah putera dari seorang wiraswasta Yahudi. Dia seorang sosiolog yang menganut teori naturalistik dengan asumsinya yang di antaranya adalah

yang berasal dari hasil pengamatan terhadap masyarakat Yahudi bahwa peningkatan konflik kelompok dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti menunjukkan lemahnya integrasi kelompok tersebut dengan masyarakat. Dalam struktur besar atau kecil konflik merupakan indikator adanya suatu hubungan yang sehat.

C. Bentuk Tindakan Premanisme

Dalam ilmu sosiologi, masyarakat dilihat dari proses sosialisasinya dapat dikelompokkan menjadi dua yang diistilahkan dengan *in group* dan *out group*. *in group* diartikan golongan kita, sedangkan *out group* diartikan sebagai bukan kelompok kita. Misalnya, kami mahasiswa Fakultas Hukum sedangkan mereka bukan kami karena mereka berasal dari Fakultas Ekonomi, kami pegawai negeri sedangkan mereka Pegawai Swasta, kami adalah pendukung calon A sedangkan mereka adalah pendukung calon B, dan sebagainya. Munculnya sikap semacam itu, dalam teori konflik dipandang natural dalam artian akan secara alamiah terjadi yang disebabkan oleh perbedaan tujuan dan kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya.

Adanya sikap *in group* dan *out group* ditengah masyarakat semacam itu akhirnya menimbulkan sikap khusus yang disebut dengan etnosentrisme, yaitu sikap untuk menilai unsur kebudayaan atau sikap orang lain dengan menggunakan

bahwa masyarakat bukan sebagai organisme melainkan sebagai nama dari individu yang saling berinteraksi, masyarakat adalah fungsi dari sosialisasi, individu merupakan produk masyarakat, dan bahwa hubungan masyarakat dengan individu bersifat dialektis.

ukuran budaya dan sikapnya sendiri,²⁷ yang mendukung salah satu calon menilai calon yang lainnya dengan ukurannya sendiri, begitu juga sebaliknya. Sebagaimana penuturan beberapa informan:

Kalau saya milih A, di samping dia pengalaman dia juga punya kemampuan untuk mengatur masyarakat dalam banyak hal.²⁸

Salah satu warga lainnya mengatakan:

Saya tidak memilih A, karena dia kurang luman ke masyarakat bawah. Dia hanya memerhatikan orang-orang tertentu, termasuk orang *bilater*. Menurut saya dia kurang pantas dijadikan pemimpin desa ini.²⁹

Sikap *in group* dan *out group* tersebut sering kali berwujud sikap antagonisme atau antipati. Bahkan dalam tataran yang lebih ekstrim, mereka akan *ngotot* untuk membenarkan kelompoknya sendiri *toh* walaupun dia sadar bahwa dirinya berada dalam pihak yang salah.³⁰ Dalam tataran inilah, tindakan-tindakan yang irasional seperti premanisme dalam aneka bentuknya bisa saja terjadi, baik itu yang berbentuk fisik (pemukulan, perusakan, dan lainnya) atau psikis (mengancam, mendesak, memaksa, dan lainnya).

Berdasar pada asumsi tersebut, tindakan-tindakan premanisme politik yang terjadi di desa Montor seperti, *money politic*, pemaksaan, mengancam, memberikan imbalan kekuasaan, dan semacamnya terjadi secara alamiah dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial. Jika dilihat dari pendapat Simmel, premanisme politik yang terjadi di Desa Montor itu dapat dimasukkan pada

²⁷ Mayor Polak, *Sosiologi; Suatu Buku Pengantar Ringka*, Jakarta: Balai Buku Ikhtiar, 1996, hal: 59

²⁸ Hasil wawancara dengan Sinta pada tanggal 13 Desember 2012, jam: 09.55

²⁹ Hasil wawancara dengan Evita dan Sule pada tanggal 13 Desember 2012, jam: 09.55

³⁰ Lihat dalam Dewi Wulansari, *Sosiologi dan Konsep Teori*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hal: 53

konflik integratif yaitu konflik yang dapat mengintegrasikan atau menyatukan beberapa pendapat dari beberapa kelompok sosial menuju integrasi sosial, dan bukan termasuk konflik yang destruktif atau konflik yang merusak. Sedangkan jika dilihat dari pendapat Coser, fenomena tersebut dapat diklasifikasikan pada konflik realistik yaitu konflik yang tampak bukan yang tidak terlihat.

D. Mengatasi Premanisme Politik dengan Etika Politik

Melihat fenomena premanisme politik yang terjadi di negeri ini, termasuk di desa Montor Sampang Madura, maka banyak para akademisi, politisi, budayawan dan lainnya, yang mengupayakan untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir tindakan tersebut. Toh walaupun, dikatakan bahwa konflik adalah fenomena natural dan dapat memberikan implikasi positif dalam kehidupan sosial sebagaimana diakui oleh para sosiolog, akan menjadi lain ketika premanisme itu terjadi dalam ranah politik. Dalam politik segala sesuatu dapat berubah hingga seratus delapan puluh derajat.

Menurut Dony Kleden³¹, tidak ada cara lain selain kembali ke pijakan dasar dalam berpolitik yakni etika politik. Etika politik sebenarnya mau menyentuh aspek moral dari politik. Etika politik biasanya dilawankan dengan etika individu, etika kelompok, atau etika institusi yang hanya menyuarakan aspirasi sepihak. Maka, kehadiran etika politik sebenarnya mau mengatasi berbagai sekat kepentingan dan memperjuangkan kesejahteraan bersama (masyarakat).

³¹ Dony Kleden adalah Mahasiswa Program Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Dia pernah menulis di harian Kompas dengan judul: Premanisme Politik.

Dalam teori politik, etika politik bukanlah sekadar gagasan himbauan moral yang naif bila dikaitkan dengan kehidupan politik praktis seperti sinyalemen adagium di atas. Minimum ada tiga prinsip yang secara metodologis dapat dijadikan untuk mengukur muatan etika politik dari sebuah politik atau pun kebijakan publik.³²

Prasyarat *pertama* adalah prinsip kehati-hatian (*principle of prudence*), sebuah prinsip yang “mempertanyakan” secara kritis tentang latar belakang berikut “pemihakan” dari sebuah tindakan ataupun kebijakan dari para pemegang kunci kekuasaan politik. Termasuk Dalam prinsip ini, sebuah tindakan yang memiliki motif untuk “memihak” kepentingan lebih luas dibanding dengan kepentingan sempit partai atau diri sendiri akan memiliki nilai etika yang jauh lebih tinggi dan terpuji.

Prinsip kedua adalah prinsip *tatakelola* (*principle of governance*) yang berhubungan dengan masalah etika di dalam “proses” pengambilan keputusan ataupun penentuan tindakan. Prinsip ini menyangkut pengukuran terhadap standar-standar yang digunakan di dalam menentukan sebuah tindakan ataupun kebijakan. Kesadaran akan pentingnya akuntabilitas, transparansi dan solidaritas, secara otomatis, akan melahirkan perilaku dan keputusan yang jauh lebih etis.

Prinsip yang ketiga adalah prinsip pilihan rasional (*principle of rational choice*) yang secara metodologis menimbang secara seksama atas manfaat dan biaya (*costs and benefits*) dari sebuah tindakan ataupun kebijakan dalam rangka kepentingan umum. Sebuah tindakan atau keputusan yang memiliki manfaat yang

³² Lihat tulisan Kastorius Sinaga, “*Tentang Etika Politik*”, Kompas, 9 April 2008

sangat tinggi dan signifikan bagi kepentingan umum jauh lebih etis dibanding tindakan yang hanya melayani kepentingan pribadi ataupun kepentingan manuver partai politik yang sesaat.

Dalam kehidupan politik sehari-hari, baik biaya (*costs*) maupun manfaat (*benefits*) tidak selalu hadir dalam bentuk fisik-material. Namun juga kedua aspek tersebut dapat diurai dalam bentuk nilai-nilai simbolik seperti stabilitas, soladiritas, ataupun loyalitas. Dari uraian tersebut, kita perlu membumikan etika politik sebagai acuan bersama bagi jagat perpolitikan negeri ini. Sehingga, para *blater* yang dalam kehidupan sehari-hari memiliki etika yang ramah dan sopan, juga bisa diterapkan dalam kehidupan politik mereka.